

**ANALISIS YURIDIS PENGATURAN ASAS KESEIMBANGAN KEPENTINGAN
RITEL MODERN DENGAN PASAR TRADISIONAL DALAM PERATURAN
DAERAH (PERBANDINGAN KOTA SURAKARTA DENGAN KOTA MALANG)**

JURNAL ILMIAH

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat Dalam Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Oleh
Riko Apriadi
NIM: 0810110057



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2014**

**ANALISIS YURIDIS PENGATURAN ASAS KESEIMBANGAN KEPENTINGAN
RITEL MODERN DENGAN PASAR TRADISIONAL DALAM PERATURAN
DAERAH**

(Perbandingan Kota Surakarta Dengan Kota Malang)

**Riko Apriadi, Bambang Winarno, M. Zairul Alam
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Email: rikooapriadii@yahoo.com**

ABSTRAK

Pada skripsi ini, penulis mengangkat tema Pengaturan Asas Keseimbangan Kepentingan Ritel Modern Dengan Pasar Tradisional Dalam Peraturan Daerah. Di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dapat ditemukan asas keseimbangan kepentingan. Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Nomor 3 Tahun 2000 menyebutkan ada lima indikasi yang merujuk pada perwujudan keseimbangan kepentingan, yaitu keresahan sosial, izin usaha, lokasi usaha, jam pelayanan, dan tata ruang yang harus sejalan dengan kepentingan umum. Lima indikasi tersebut dimuat dalam Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53 Tahun 2008 dan Nomor 70 Tahun 2013. Namun pengaturan tersebut tidak cukup sampai di situ. Dalam hierarki perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, peraturan daerah merupakan produk hukum pemerintahan di daerah. Peraturan daerah merupakan ujung tombak pelaksanaan asas keseimbangan pelaku usaha di daerah. Perkembangan pesat sektor usaha ritel menggambarkan pasar tradisional, yang merupakan wadah bagi pelaku usaha kecil, semakin tersisih dengan keberadaan ritel modern. Pengaturan persaingan pelaku usaha ritel modern dengan pasar tradisional di daerah merupakan suatu kajian penting untuk mengukur pencerminan asas keseimbangan kepentingan para pelaku usaha tersebut agar tercipta iklim persaingan usaha yang kondusif.

Kata Kunci: asas keseimbangan kepentingan, ritel modern, pasar tradisional, pengaturan persaingan.

***JURIDICAL ANALYSIS PRINCIPLE OF BALANCE OF INTEREST REGULATION
BETWEEN MODERN RETAIL MARKET AND TRADITIONAL RETAIL MARKET IN
LOCAL REGULATION***

(Comparison Between Surakarta And Malang)

**Riko Apriadi, Bambang Winarno, M. Zairul Alam
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Email: rikooapriadii@yahoo.com**

ABSTRACT

In this thesis, the author takes on theme Principle of Balance of Interests Between Modern Retail Market and Traditional Retail Market In Local Regulations. In Article 2 of Act Number 5 Year 1999 can be found the principle of balance of interests. Business Competition Supervisory Commission (KPPU)'s Decision Number 3 Year 2000 mentioned there are five

indications that refer to the balance of interests enforcement, they are social unrest, business license, business location, active hours, and spatial planning should be consistent with the public interest. Those five indications contained in Presidential Regulation Number 112 Year 2007, Trade Minister Regulation Number 53 Year 2008 and Number 70 Year 2013. But regulations are not enough here. In the hierarchy of legislation in Indonesian, local legislation is a product of local government law. Local regulations is the main power to enforce the principle of balance businesses in any region. Rapid development of the retail sector shows that traditional retail market, where most of all small businesses exist, increasingly marginalized by the presence of modern retail market. Competition regulation between modern retail market and traditional retail markets in any region is an important study to measure the reflection of principle balance of interests of the entrepreneurs in order to create a conducive climate for business competition.

Key Word: principle of balance of interest, modern retail market, traditional retail market, competition regulation

A. Pendahuluan

Dewasa ini perkembangan perekonomian dunia di beberapa sektor bidang usaha berkembang pesat. Perkembangan perekonomian yang pesat ini juga terjadi di Indonesia, salah satunya adalah jenis usaha ritel modern. Semakin banyaknya *hypermarket*, *supermarket*, *minimarket* yang beroperasi di berbagai daerah mengindikasikan perkembangan jenis usaha dalam bentuk ini tidak dapat dihindari seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat di era globalisasi saat ini.

Berdasarkan informasi dari Data Analyst Manager Frontier Consulting Group, dalam periode enam tahun terakhir, dari tahun 2007-2012, jumlah gerai ritel modern di Indonesia mengalami pertumbuhan rata-rata 17,57% (tujuh belas koma lima puluh tujuh persen) per tahun. Pada tahun 2007, jumlah usaha ritel di Indonesia masih sebanyak 10.365 gerai, kemudian pada tahun 2011 mencapai 18.152 gerai tersebar di hampir seluruh kota di Indonesia.¹

Federasi Organisasi Pedagang Pasar Indonesia (FOPPI) mencatat, di seluruh Indonesia terjadi penyusutan jumlah pasar tradisional sebesar 8% (delapan persen) per tahun. Pada saat bersamaan, pertumbuhan pasar modern justru sangat tinggi. Mengambil contoh periode 2004-2007, laju pertumbuhan *supermarket* mencapai 50% (lima puluh persen) per tahun. Pada periode yang sama, pertumbuhan *hypermarket* bahkan mencapai 70% (tujuh puluh persen). Gambaran pada tahun 2010, Badan Pusat Statistik mencatat pertumbuhan bisnis ritel modern meningkat positif mencapai 6,1% (enam koma satu persen). Sebaliknya keberadaan ritel tradisional masih menyisakan berbagai masalah. Berdasarkan survei yang dilakukan

¹ Apipudin, *Brand Switching Analysis Dalam Industri Ritel Modern*, Frontier Consulting Group, diakses dari <http://www.frontier.co.id/tag/brand-switching-analysis> pada tanggal 9 Juni 2013 pukul 14.33

Kementerian Perdagangan (Kemendag) di 12 (dua belas) provinsi, tercatat ada kurang lebih 3.900 pasar tradisional dan 91% (sembilan puluh satu persen) di antaranya dibangun kurang lebih 30 (tiga puluh) tahun yang lalu.²

Dunia usaha memang merupakan suatu dunia yang boleh dikatakan tidak dapat berdiri sendiri. Banyak aspek dari berbagai macam dunia lainnya turut terlibat baik langsung maupun tidak langsung dengan dunia usaha ini. Keterkaitan tersebut kadangkala membuat dunia usaha harus tunduk dan mengikuti rambu-rambu yang ada atau dunia usaha mengabaikan aturan-aturan yang telah ada.³ Pesatnya perkembangan dunia usaha ada kalanya tidak diimbangi dengan “penciptaan” rambu-rambu pengawas. Dunia usaha yang berkembang terlalu pesat sehingga meninggalkan rambu-rambu yang ada jelas tidak akan menguntungkan pada akhirnya.⁴

Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang telah memiliki Undang-Undang Persaingan Usaha dan Anti Monopoli, yang dilatarbelakangi dari perjanjian yang dilakukan antara Dana Moneter Internasional atau *International Monetary Fund* (IMF) dengan pemerintah Republik Indonesia, pada tanggal 15 Januari 1998. Akhirnya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ditandatangani oleh Presiden B.J. Habibie dan diundangkan pada tanggal 5 Maret 1999 serta berlaku satu tahun setelah diundangkan⁵.

Produk hukum berupa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 merupakan bentuk usaha dari Pemerintah Republik Indonesia mengenai pentingnya menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat agar tercipta pembangunan ekonomi yang baik. Pasal 2 undang-undang ini memuat asas dalam persaingan usaha di Indonesia, dan Pasal 3 memuat tujuan dari undang-undang ini. Peraturan mengenai persaingan akan membantu dalam mewujudkan⁶ demokrasi ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 Ayat (1) Undang-undang Dasar (UUD) 1945 dan menjamin sistem persaingan usaha yang bebas dan adil untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat serta menciptakan sistem perekonomian yang efisien.

Adanya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan dan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat merupakan rambu-rambu dan batasan dalam mengakses “kue” pembangunan sehingga si besar tidak dengan seenaknya mengambil bagian si kecil⁷.

² Tri Joko Utomo, *Persaingan Bisnis Ritel: Tradisional vs Modern*, Fokus Ekonomi Vol.6 No.1 Juni 2011, hlm 123

³ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Anti Monopoli*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm 1

⁴ *ibid*

⁵ *Ibid* hlm 13

⁶ Andi Fahmi Lubis, *op.cit.*, hlm 15

⁷ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *op.cit.*, hlm 6

Undang-undang ini juga dapat dikaitkan dengan keberadaan ritel modern yang semakin mengancam keberadaan pasar tradisional.

Tidak hanya undang-undang ini, untuk menjaga kepentingan pelaku usaha agar tetap seimbang dalam sector ritel, terutama antara pelaku usaha pasar tradisional dan ritel modern, pemerintah juga mengeluarkan peraturan-peraturan terkait, seperti Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53 Tahun 2008, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008, dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70 Tahun 2013.

Menurut Komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Ir. Dedie S. Martadisastira, SE, MM, bahwa ujung tombak dalam pengaturan ritel modern itu adalah Pemerintah Daerah. Setiap daerah harus mengakomodasi dan mengadopsi peraturan mengenai ritel modern di daerah masing-masing⁸. Peran pemerintah di daerah tentunya sangat penting demi tercapainya keseimbangan kepentingan antara pelaku usaha ritel modern dengan pasar tradisional. Adanya pelaku usaha, pemerintah, dan masyarakat menjadi suatu hal yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Pemerintah selaku pengatur dan pembuat kebijakan memiliki peranan yang sangat penting dalam hal ini. Adapun ketentuan-ketentuan yang berlaku di dalamnya harus diterapkan secara konsisten oleh pemerintahan di daerah.

Kota Surakarta atau dikenal dengan sebutan Kota Solo, dan Kota Malang merupakan dua kota yang saat ini mengalami perkembangan pesat dalam pembangunannya, terutama dalam hal perekonomian. Terdapat banyak industri ritel yang berdiri seiring dengan kemajuan dua kota ini. Persaingan usaha di dalamnya sangat perlu diatur sebaik-baiknya agar terjadi kemajuan ekonomi bersama.

Kebijakan pemerintah di daerah, selaku kepanjangan tangan dari pemerintah pusat dalam menegakkan aturan yang sudah diatur di dalam peraturan perundang-undangan di atasnya, sangat penting untuk meningkatkan dan melindungi pasar tradisional. Sejauh mana kedua peraturan daerah di Kota Surakarta dan Kota Malang dalam menyikapi perkembangan usaha ritel yang semakin pesat serta tetap menjaga keberlangsungan pasar tradisional merupakan hal yang perlu untuk dikaji. Untuk itu kajian-kajian akan difokuskan pada perbandingan peraturan daerah di dua kota berbeda, yaitu Kota Surakarta dan Kota Malang sesuai dengan asas keseimbangan kepentingan pelaku usaha dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

⁸Majalah Kompetisi Edisi 34, *op.cit*, hlm 8-9

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas penulis menarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana prinsip asas keseimbangan kepentingan antara pelaku usaha ritel modern dengan pasar tradisional dalam hukum persaingan usaha?
2. Bagaimana Peraturan Daerah Kota Surakarta dan Kota Malang mengatur keberadaan ritel modern dengan pasar tradisional?
3. Bagaimana model pengaturan yang tepat mengenai asas keseimbangan kepentingan di dalam Peraturan Daerah Kota Surakarta dan Peraturan Daerah Kota Malang?

C. Pembahasan

1. Analisis Prinsip Asas Keseimbangan Kepentingan Pelaku Usaha Ritel Modern Dengan Pasar Tradisional Dalam Hukum Persaingan Usaha

a. Gambaran Umum Persaingan Ritel Modern Dengan Pasar Tradisional Di Indonesia

Latar belakang semakin banyaknya berdiri ritel modern berawal dari kebijakan liberalisasi pasar perdagangan eceran atau ritel di Indonesia sejak ditandatanganinya *Letter of Intent* (LoI) antara pemerintah Indonesia dengan IMF tahun 1998, yang salah satu hasil LoI adalah memberikan kebebasan kepada investor asing masuk ke industri ritel. Hal ini kemudian ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 99 Tahun 1998 dan Surat Keputusan (SK) Menteri Investasi Nomor 29/SK/1998. Liberalisasi selanjutnya semakin mendapat tempat dengan dikeluarkannya Undang-Undang Penanaman Modal Nomor 25 Tahun 2007 dan Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 yang lebih memberikan asing untuk dapat membuka usaha ritel di seluruh Indonesia. Hal ini berimplikasi bahwa kompetisi semakin kompleks, tidak hanya kompetisi antara peritel Indonesia dengan peritel asing, tetapi juga antara peritel Indonesia yaitu peritel modern dengan peritel tradisional. Penempatan pedagang ritel modern dengan pedagang tradisional tidaklah tepat, karena yang menjadi persoalan adalah peritel modern ada dan mengambil bagian dari kehidupan pasar tradisional, sasaran pembeli pasar tradisional juga dibidik oleh pasar ritel modern.⁹

Industri ritel di Indonesia memberikan kontribusi yang besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan juga menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar. Sebagai negara yang membangun, angka pertumbuhan industri ritel Indonesia dipengaruhi oleh kekuatan daya beli

⁹ Dedie S. Martadisastra, *Persaingan Usaha Ritel Modern dan Dampaknya Terhadap Perdagangan Ritel Tradisional*, Jurnal Persaingan Usaha Vol. 4, Jakarta, KPPU, 2010, hlm 76

masyarakat, penambahan jumlah penduduk, dan juga adanya kebutuhan masyarakat akan pemenuhan produk konsumsi.¹⁰

Kehadiran industri ritel modern pada dasarnya memanfaatkan pola belanja masyarakat terutama kelas menengah ke atas yang tidak mau berdesak-desakan di dalam pasar tradisional yang biasanya becek atau tidak tertata rapi. Walaupun kehadiran ritel modern ini disoroti dapat mematikan pasar tradisional karena mempunyai keunggulan pada banyak faktor, perkembangannya sendiri dapat dikatakan tidak terbendung.¹¹

Beberapa kalangan memandang bahwa makin meluas pendirian pasar modern di Indonesia, makin baik bagi pertumbuhan ekonomi serta iklim persaingan usaha. Sementara itu, kalangan lain berpendapat bahwa di era globalisasi pasar tradisional telah menjadi korban dari kompetisi sengit antara sesama pasar modern, baik lokal maupun asing. Pasar tradisional kehilangan pelanggan akibat praktik usaha yang dilakukan oleh pasar modern.¹²

Pada tahun 2006, dalam sebuah klaimnya, Asosiasi Perusahaan Ritel Indonesia (APRINDO), yang selama ini banyak mewakili kepentingan peritel modern menyatakan bahwa sektor ritel merupakan sektor kedua yang menyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia, dengan kemampuan menyerap sebesar 18,9 (delapan belas koma sembilan) juta orang¹³. Kemudian jumlah ini meningkat di tahun-tahun berikutnya. Berdasarkan Data BPS per Agustus 2011 menunjukkan bahwa sektor ini mampu menyerap 23,4 (dua puluh tiga koma empat) juta tenaga kerja. Angka ini menempati posisi kedua setelah sektor pertanian yang menampung 39,3 (tiga puluh sembilan koma tiga) juta tenaga kerja usia di atas 15 (lima belas) tahun.¹⁴

Berdasarkan contoh *brand* dari ritel modern, mewakili bentuk *hypermarket*, PT Carrefour Indonesia, dengan total nilai saham sebesar Rp 7,2 (tujuh koma dua) triliun, pada tahun 2011 penjualannya melampaui 1,3 (satu koma tiga) miliar dolar Amerika Serikat. Bila dijumlahkan dalam nilai mata uang rupiah, total penjualannya lebih kurang Rp 12,9 (dua belas koma sembilan) triliun. Laba kotor yang dapat dihitung adalah sebesar Rp 4,1 (empat koma satu) triliun selama tahun 2011.¹⁵

¹⁰ Euis Soliha, *op.cit*, hlm 1

¹¹ *Ibid*

¹² Adrie Poesoro, *Pasar Tradisional Di Era Persaingan Global*, SMERU Newsletter Nomor 22: April-Juni, 2007, hlm 5

¹³ *Ibid*, hlm 1

¹⁴ Majalah Kompetisi Edisi 34, *op.cit*, hlm 4

¹⁵ Kompas.com 20 November 2012, *CT Borong Seluruh Saham Carrefour Indonesia*, diakses di <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2012/11/20/16250733/CT.Borong.Seluruh.Saham.Carrefour.Indonesia> pada tanggal 12 Desember 2013 pukul 19.03

Mewakili bentuk *supermarket*, PT Hero Supermarket Tbk membukukan membukukan pendapatan bersih belum diaudit sebesar Rp 4,83 (empat koma delapan puluh tiga) triliun pada semester I 2012, tumbuh 20,1% dari semester I (satu) 2011 sebesar Rp 4,02 (empat koma nol dua) triliun. Kenaikan pendapatan mendorong laba komprehensif Hero naik 29,7% (dua puluh sembilan persen) menjadi Rp 139,7 (seratus tiga puluh sembilan koma tujuh) miliar dari sebelumnya Rp 107,6 (seratus tujuh koma enam) miliar.¹⁶

Kemudian yang terakhir, mewakili bentuk *minimarket*, pada semester I (satu) 2013 membukukan laba kotor sebesar Rp 2,93 (dua koma sembilan puluh tiga) triliun, naik 44,89% (empat puluh empat koma delapan puluh sembilan persen) dibanding periode yang sama 2012 sebesar Rp 2,03 (dua koma nol tiga) triliun, sehingga *gross profit margin* perseroan naik dari 17,6% (tujuh belas koma enam persen) menjadi 19,2% (sembilan belas koma dua persen).¹⁷

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46 Tahun 2009 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan dan fakta mengenai laba yang didapatkan contoh brand ritel tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa ritel modern termasuk ke dalam kategori usaha besar.

Sedangkan terkait pasar tradisional, pada sebuah penelitian di tahun 2008, peritel tradisional telah berjumlah 12,6 (dua belas koma enam) juta pedagang pasar tradisional yang terdiri dari pedagang kecil dan lemah modal¹⁸. Namun struktur pasar ritel tetap dikuasai oleh mereka yang mempunyai modal dan jaringan distribusi yang luas¹⁹. Ketidakadilan yang dirasakan pedagang pasar tradisional akibat berbagai kelemahan yang dimiliki bila dihadapkan pada persaingan terhadap ritel modern mengindikasikan satu atau beberapa komponen yang terabaikan atau terganggu.

b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

Harmonisasi/penyelarasan antara kepentingan pelaku usaha dengan pelaku usaha pesaing lainnya sangat penting dilakukan. Hal ini ditujukan agar terciptanya ekosistem persaingan usaha yang sehat sesuai dengan tujuan dibentuknya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Perwujudan dari harmonisasi/penyelarasan kepentingan antar pelaku usaha dilakukan dengan

¹⁶ Indonesia Finance Today 24 Juli 2012, *Pendapatan Hero Capai Rp 4,83 Triliun di Semester I*, diakses di <http://www.indonesiainancetoday.com/read/30509/Pendapatan-Hero-Capai-Rp-483-Triliun-di-Semester-I> pada tanggal 12 Desember 2013 pukul 19.08

¹⁷ Indonesia Finance Today 23 September 2013, *Indomaret Bukukan Laba Kotor Rp 2,93 Triliun*, diakses di <http://www.indonesiainancetoday.com/read/30509/Pendapatan-Hero-Capai-Rp-483-Triliun-di-Semester-I> pada tanggal 12 Desember 2013 pukul 19.23

¹⁸ Ali Jusmono, *Persaingan Usaha Pasar Ritel Di Indonesia: Siapa Yang Menang*, Jurnal Hukum Bisnis Vol. 27 Nomor1 Tahun 2008, Fakultas Hukum Unika Atma Jaya, Jakarta, 2008, hlm 4

¹⁹ Uswatun Hasanah dan Indien Winarwati, *op.cit*, hlm 237

memberikan porsi kepentingan dan kedudukan yang sama baik dalam bidang hukum maupun dalam bidang ekonomi.²⁰

Untuk memahami penerapan pada pasal-pasal Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, terdapat dua pendekatan, yaitu *per se illegal* dan *rule of reason*. Dari rumusan pasal-pasal yang terdapat di dalamnya, dapat dilihat adanya keinginan pembentuk undang-undang untuk menempatkan keseimbangan kepentingan sebagai berikut:²¹

- a. Penempatan keseimbangan antara kepentingan umum dan kepentingan pelaku usaha, dengan menitikberatkan pada perlindungan terhadap kepentingan umum secara mutlak.
 - (1) Pasal-pasal yang merumuskan larangan secara mutlak, yakni pasal 6, pasal 8, pasal 9, pasal 12, pasal 15, pasal 20 ayat (5), pasal 24 ayat (1), (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.
 - (2) Pasal-pasal yang merumuskan larangan dengan menentukan kriteria, yakni pasal 13 ayat (1) dan (2), pasal 17 ayat (1) dan (2), pasal 18 ayat (1) dan (2), pasal 19, pasal 25 ayat (1) dan (2) dan pasal 27 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.
- b. Penempatan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dengan kepentingan umum, dengan memberikan peluang yang lebih besar kepada pelaku usaha dalam mengembangkan kegiatan usahanya sepanjang tidak merugikan masyarakat dan atau menimbulkan persaingan usaha tidak sehat. Adapun pasal-pasal yang termasuk dalam kelompok ini adalah pasal 7, pasal 10 ayat (1), pasal 11, pasal 14, pasal 16, pasal 21, pasal 26 dan pasal 28 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.
- c. Penempatan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha yang tergolong usaha kecil dan koperasi atau usaha dengan kepentingan tujuan tertentu dengan pelaku usaha lainnya, dengan memberikan perlakuan khusus bagi pelaku usaha kecil, koperasi maupun usaha dengan tujuan tertentu tersebut. Hal ini dapat ditemukan dalam pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yang memuat ketentuan pengecualian yang bersifat umum dan pasal 50 ayat (2) huruf (h) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

²⁰ Richy Ardiansyah, Dalam Artikel Ilmiah: *Analisis Yuridis Tentang Penerapan Asas Keseimbangan Kepentingan Dalam Penyelesaian Perkara Persaingan Usaha Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2013, hlm 12

²¹ Winarno, SH, *Op.cit*, hlm 214-218

Pada huruf c di atas dikemukakan bahwa pelaku usaha kecil mendapat perlakuan khusus. Di dalam penjelasan Undang-Undang ini, pelaku usaha yang tergolong dalam usaha kecil adalah sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil.

Selain mengatur segala bentuk persaingan usaha, kegiatan-kegiatan yang dilarang, perjanjian-perjanjian yang dilarang, dan lain sebagainya, pembentuk undang-undang persaingan usaha juga tetap memperhatikan pelaku usaha kecil dalam melangsungkan usahanya. Dari penjelasan pasal 50 huruf (h) dapat disimpulkan bahwa melindungi pengusaha kecil dalam persaingan menghadapi pesaing dari pengusaha-pengusaha yang tergolong pengusaha besar yang lebih mapan baik permodalan, manajemen maupun jaringan pemasaran produksi merupakan salah satu alasan dikecualikannya pengusaha kecil dalam Undang-Undang ini. Pada kenyataannya pengusaha yang tergolong pengusaha kecil adalah pelaku usaha yang jumlahnya lebih banyak dibanding dengan pengusaha besar, golongan pengusaha kecil ini sering mengalami kesulitan modal, pengembangan perusahaan dan persaingan pasar. Sementara jaringan usaha dan jangkauan pemasaran produksinya sangat terbatas. Oleh karena itu wajar apabila pemerintah memberikan perlindungan bagi mereka agar tetap dapat eksis dalam dunia usaha

c. Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2000

Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) ini terkait gugatan yang diajukan oleh lembaga swadaya masyarakat yang mewakili pengusaha kecil/pemilik warung yang merasakan dampak negatif dengan kehadiran ritel modern “Indomaret” sebagai pihak terlapor di Kota Jakarta.

Meskipun pada akhirnya, di dalam putusan ini, KPPU tidak menemukan bukti yang kuat adanya pelanggaran pada pasal-pasal yang dilaporkan, KPPU dalam pertimbangannya²² menemukan hal-hal yang berkaitan dengan keresahan sosial, perizinan usaha, lokasi usaha, jam pelayanan, dan tata ruang yang kurang sejalan dengan asas kepentingan umum secara terpadu guna mewujudkan keseimbangan kepentingan, yang perlu dikembangkan lebih lanjut.

Dapat disimpulkan bahwa dalam putusan ini, ditemukan beberapa indikator yang harus diperhatikan terkait asas kepentingan umum guna terwujudnya keseimbangan kepentingan antara ritel modern dengan pengusaha kecil, yaitu terkait keresahan sosial, perizinan usaha, lokasi usaha, jam pelayanan, dan tata ruang.

²² *Ibid*, hlm 4

d. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007

Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern merupakan aturan main bagi pelaku usaha di bidang perdagangan antara pedagang tradisional dengan toko modern agar pasar tradisional dapat bersaing dengan toko modern melalui pengaturan-pengaturan yang terdapat di dalamnya.

Beberapa hal penting yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 112 tahun 2007 yakni:²³

- a. Batas luas lantai penjualan toko modern: *minimarket* kurang dari 400 m² (empat ratus meter persegi), *supermarket* 400 m² (empat ratus meter persegi) sampai dengan 5.000 m² (lima ribu meter persegi), *hypermarket* di atas 5.000 m² (lima ribu meter persegi), *department store* di atas 400 m² (empat ratus meter persegi), *perkulakan* di atas 5.000 m² (lima ribu meter persegi).
- b. Pengaturan lokasi:
 1. *Perkulakan*: hanya boleh berlokasi pada atau pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor primer atau arteri sekunder.
 2. *Hypermarket* dan Pusat Perbelanjaan, hanya boleh berlokasi pada atau pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor, dan tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lokal atau lingkungan (perumahan) di dalam kota/perkotaan.
 3. *Supermarket* dan *Departement Store*: Tidak boleh berlokasi pada sistem jaringan jalan lingkungan; dan tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lingkungan (perumahan) di dalam kota.
 4. Pasar Tradisional: boleh berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan.
- c. Perizinan:

Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T) untuk Pasar Tradisional, Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP) untuk pertokoan, *mall*, *plaza*, dan pusat perdagangan, Izin Usaha Toko Modern (IUTM) untuk *minimarket*, *supermarket*, *department store*, *hypermarket* dan *perkulakan* Kelengkapan Permintaan IUP2T, IUPP, dan IUTM: Studi Kelayakan termasuk AMDAL serta Rencana Kemitraan dengan UK (Usaha Kecil). IUP2T, IUPP dan IUTM diterbitkan oleh

²³ M. Djumantri, Dalam Artikel: *Pasar Tradisional, Ruang Masyarakat Tradisional Yang Terpinggirkan*, hlm 7

Bupati/Walikota dan Gubernur untuk Pemprov DKI Jakarta. Pedoman Tata-cara Perizinan ditetapkan oleh Menteri Perdagangan.

d. Pembinaan dan Pengawasan

Pemerintah dan Pemerintah Daerah baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing melakukan pembinaan dan pengawasan Pasar dan Toko Modern.

e. Pemberdayaan

Pasar Tradisional

Mengupayakan sumber-sumber alternatif pendanaan untuk pemberdayaan, meningkatkan kompetensi pedagang dan pengelola, memprioritaskan kesempatan memperoleh tempat usaha bagi pedagang pasar tradisional yang telah ada sebelum dilakukan renovasi atau relokasi, serta mengevaluasi pengelolaan.

Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern

Memberdayakan pusat perbelanjaan dan toko modern dalam membina pasar tradisional, serta mengawasi pelaksanaan kemitraan.

e. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53 Tahun 2008

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern merupakan pedoman teknis lebih lanjut sebagaimana yang telah diatur sebelumnya di dalam Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007. Di dalam peraturan menteri ini juga diatur perihal luas toko modern, lokasi, perizinan, pembinaan dan pengawasan, serta pemberdayaan.

Namun terdapat hal-hal yang berbeda dibandingkan dengan pengaturan sebelumnya, yaitu Permendag Nomor 53 Tahun 2008 memberikan pengecualian persyaratan analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat bagi pendirian *minimarket*, sebagaimana diatur di dalam pasal 3. Permendag Nomor 53 Tahun 2008 juga memberikan batasan jenis-jenis toko modern yang dapat dimasuki oleh penanam modal dalam negeri 100% (seratus persen).

f. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70 Tahun 2013

Selain kewajiban Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern untuk menyediakan barang dagangan produksi dalam negeri paling sedikit 80% (delapan puluh persen) dari jumlah dan

jenis barang yang diperdagangkan, menurut Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Srie Agustina, beberapa hal penting baru yang diatur antara lain:²⁴

1. *Outlet/gerai* toko modern yang dimiliki dan dikelola sendiri (*company owned outlet*) paling banyak 150 (seratus lima puluh) *outlet/gerai*;
2. Kewajiban Pusat Perbelanjaan menyediakan atau menawarkan “*counter image*” atau ruang usaha untuk pemasaran barang dengan merek dalam negeri;
3. Toko Modern dapat menjual barang pendukung usaha utama paling banyak 10% (sepuluh persen) serta barang merek sendiri paling banyak 15% (lima belas persen) dari keseluruhan jumlah barang yang dijual di *outlet/gerai* Toko Modern;
4. Pelarangan *Minimarket* menjual barang produk segar dalam bentuk curah, dan bagi *Minimarket* yang berlokasi di sekitar pemukiman penduduk, tempat ibadah, terminal, stasiun, rumah sakit, gelanggang remaja dan sekolah dilarang menjual minuman beralkohol;
5. Biaya yang berhubungan langsung dengan penjualan barang yang dikenakan Toko Modern kepada Pemasok paling banyak 15% (lima belas persen) dari keseluruhan biaya-biaya *trading terms*;
6. Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota baik sendiri maupun secara bersama-sama melakukan pemberdayaan terhadap pengelolaan Pasar Tradisional dalam rangka peningkatan daya saing, yang dilakukan dalam bentuk:
 - a. peremajaan atau revitalisasi bangunan Pasar Tradisional;
 - b. penerapan manajemen pengelolaan yang profesional;
 - c. penyediaan barang dagangan dengan mutu yang baik dan harga yang bersaing; dan/atau
 - d. fasilitasi proses pembiayaan kepada para pedagang pasar guna modal kerja dan kredit kepemilikan tempat usaha.

g. Hukum Persaingan Usaha Dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Menengah

Perkembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia selama ini dapat digunakan sebagai suatu refleksi dari iklim persaingan yang berlaku di pasar domestik

²⁴ Dalam Artikel *Tingkatkan Akses Pemasaran Produk Indonesia, Mendag Terbitkan Permendag Baru*, diakses di www.kemendag.go.id pada tanggal 10 Januari 2014

selama ini. Data dari BPS menunjukkan bahwa selama era Orde Baru hingga sekarang, jumlah unit usaha dari kelompok UMKM tetap mendominasi jumlah unit usaha di Indonesia maupun jumlah kesempatan kerja. Pada tahun 2006 usaha mikro dan kecil (UMK) mengerjakan 80.933.384 orang, atau sekitar 91,14 (sembilan puluh satu koma empat belas) persen dari jumlah angkatan kerja yang bekerja. Jumlah ini meningkat dari 70.282.178 orang pada tahun 2003, atau laju pertumbuhan sebesar 15,15 (lima belas koma lima belas) persen. Sedangkan di usaha menengah (UM) dan usaha besar (UB), masing-masing, tercatat sebanyak 4.483.109 dan 3.388.462 orang. Jumlah pekerja di UM dan UB tersebut, masing-masing, menurun dan meningkat dari 8.754.615 dan 438.198 orang atau masing-masing dengan tingkat pertumbuhan 48,79% (empat puluh delapan koma tujuh puluh sembilan persen) dan 673,27% (enam ratus tujuh puluh tiga koma dua puluh tujuh persen) pada tahun 2003.²⁵

UMKM sangat vital karena sebagian besar jumlah angkatan yang bekerja menggantungkan hidup pada sektor usaha ini. Ketidakberpihakan pemerintah atau regulasi terhadap sektor ini dapat mengakibatkan meningkatnya angka kemiskinan sebagai akibat dari kalah bersaingnya usaha mikro dan kecil. Dalam hal ini sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya terkait industri, bahwa pasar tradisional merupakan wadah bagi para pedagang kecil yang termasuk usaha mikro dan kecil menjalankan aktivitas usahanya. Sementara ritel modern mewakili kepentingan pelaku usaha menengah dan besar.

Untuk mendapatkan efek positif dari penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terhadap upaya peningkatan perekonomian nasional, maka penerapan undang-undang tersebut harus dibarengi dengan pemberdayaan/ penguatan usaha-usaha yang lebih lemah, yang pada umumnya di Indonesia adalah UMKM, di mana telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Prinsip asas keseimbangan kepentingan yang merupakan salah satu asas di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 merupakan solusi demi terciptanya keharmonisan baik pelaku usaha ritel modern dan pasar tradisional.

2. Analisis Pengaturan Ritel Modern Dengan Pasar Tradisional Di Dalam Peraturan Daerah Kota Surakarta dan Kota Malang

a. Di Kota Malang

Pengaturan ritel modern dengan pasar tradisional di Kota Malang berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perindustrian dan Perdagangan. Peraturan daerah ini berdasarkan pertimbangan pada

²⁵ Tulus T.H. Tambunan dan Dedie S. Martadisastra, *op.cit*, hlm 6

peraturan perUndang-Undangan yang berkaitan dengan persaingan usaha, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, serta Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/MDAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern

b. Di Kota Surakarta

Pengaturan ritel modern dengan pasar tradisional di Kota Surakarta berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern. Peraturan daerah ini berdasarkan pertimbangan pada peraturan perUndang-Undangan yang berkaitan dengan persaingan usaha, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, serta Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/MDAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

3. Model Pengaturan Asas Keseimbangan Kepentingan Peraturan Daerah Kota Surakarta dan Peraturan Daerah Kota Malang Dalam Menjamin Kepastian Kesempatan Berusaha Yang Sama Antara Ritel Modern Dengan Pasar Tradision

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, daerah diberi kewenangan ekonomi untuk mengatur dan mengurus perekonomian daerah, namun pengaturan dan pengurusan di bidang ekonomi harus tetap berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di nasional. Kebijakan di daerah di bidang perekonomian tidak boleh bertentangan dengan kebijakan perekonomian nasional karena materi peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional.²⁶

Sebagaimana Peraturan Daerah Kota Malang dan Peraturan Daerah Kota Surakarta yang telah dijabarkan di atas, maka agar lebih memahami pengaturan-pengaturan di dalam kedua peraturan daerah tersebut di atas terkait asas keseimbangan kepentingan antara pelaku usaha ritel modern dengan pasar tradisional, maka hal tersebut akan dijabarkan di dalam tabel-tabel di bawah ini.

Tabel 1

²⁶ Andi Fahmi Lubis, dkk, *op.cit*, hlm 227

**Asas Keseimbangan Kepentingan Antara Pelaku Usaha Ritel Modern Dengan
Pasar Tradisional Dalam Peraturan Daerah Kota Malang**

Pasal Yang Mengakomodasi Kepentingan Pelaku Usaha Ritel Modern	Pasal Yang Mengakomodasi Kepentingan Pelaku Usaha Pasar Tradisional
<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 2 mengenai kewajiban memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) • Pasal 3 mengenai kriteria pemegang SIUP • Pasal 23 Ayat (1) mengenai lokasi usaha, dan mengacu pada Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayan Kota Malang • Pasal 23 Ayat (2) mengenai batasan minimal jarak 500 meter antar <i>minimarket</i>, toko dan pasar tradisional/usaha perdagangan mikro • Pasal 24 mengenai batasan luas masing-masing jenis ritel modern • Pasal 25 mengenai kewajiban memiliki Izin Usaha Toko Modern (IUTM) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Pasal 2 mengenai kewajiban memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) ○ Pasal 3 mengenai kriteria pemegang SIUP ○ Pasal 4 huruf (c) mengenai pengecualian terhadap usaha mikro untuk memiliki SIUP, kecuali bila usaha mikro yang bersangkutan menghendaki ○ Pasal 23 Ayat (1) mengenai lokasi usaha, dan mengacu pada Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011 terkait lokasi pasar tradisional ○ Pasal 23 Ayat (2) mengenai batasan minimal jarak 500 meter antar <i>minimarket</i>, toko dan pasar tradisional/usaha perdagangan mikro

Di dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2010, kepentingan pelaku usaha ritel modern mengenai izin usaha di dalam Pasal 2 dan Pasal 3, lokasi usahanya diatur di dalam Pasal 23. Sedangkan kepentingan pelaku usaha pasar tradisional mengenai izin usaha diatur di dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4. Di dalam Pasal 4 diberikan kemudahan bagi pelaku usaha mikro dalam proses perizinannya, di mana pelaku usaha mikro tidak wajib mengurus izin perdagangan kecuali pihak yang bersangkutan menghendaki. Kemudian mengenai lokasi usaha, tidak diatur secara jelas di dalam peraturan daerah ini karena mengacu pada RTRW sebagaimana yang telah diatur dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011.

Tabel 2
Asas Keseimbangan Kepentingan Antara Pelaku Usaha Ritel Modern Dengan Pasar Tradisional Dalam Peraturan Daerah Kota Surakarta

Pasal Yang Mengakomodasi Kepentingan Pelaku Usaha Ritel Modern	Pasal Yang Mengakomodasi Kepentingan Pelaku Usaha Pasar Tradisional
<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 2 mengenai asas dan tujuan dari penataan dan pembinaan pusat perbelanjaan dan toko modern • Pasal 6 mengenai batasan luas ritel modern • Pasal 7 dan 8 mengenai lokasi pendirian usaha beserta syarat-syaratnya • Pasal 10 mengenai jenis barang dagangan di masing-masing jenis ritel modern • Pasal 16 mengenai izin usaha • Pasal 15 mengenai pengembangan kemitraan antara toko modern dengan UMKM • Pasal 18 mengenai pembinaan dan pengawasan 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Pasal 3 mengenai tujuan peraturan daerah ini untuk melindungi dan memberdayakan koperasi, UMKM, dan pasar tradisional ○ Pasal 7 mengenai lokasi usaha, yang melindungi lokasi usaha pasar tradisional dari lokasi usaha toko modern ○ Pasal 8 mengenai pendirian ritel modern yang harus mencegah dampak negatif terhadap eksistensi pasar tradisional ○ Pasal 10 Ayat (1) mengenai kriteria jenis barang yang dijual di toko modern, sehingga pasar tradisional lebih luas cakupan jenis barang yang diperdagangkan ○ Pasal 13 yang memberikan batasan jam kerja terhadap ritel modern, sehingga pasar tradisional dapat dengan leluasa beroperasi ○ Pasal 14 mengenai sistem waralaba yang dijalankan oleh <i>minimarket</i> harus memenuhi persyaratan yang tidak merugikan UMKM dan koperasi ○ Pasal 15 mengenai kemitraan yang tidak boleh merugikan UMKM dan koperasi

	<ul style="list-style-type: none"> o Pasal 16 mengenai izin usaha toko modern yang wajib tidak bertabrakan dengan izin usaha pasar tradisional
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Di dalam Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 5 Tahun 2011, sebagaimana yang telah diuraikan pada tabel di atas, menunjukkan bahwa perda ini berusaha mengakomodasi kepentingan para pelaku usaha secara seimbang, baik dari segi lokasi usaha, kemitraan toko modern dengan UMKM, izin usaha, serta pembinaan dan pengawasannya

Dari kedua tabel tersebut di atas (Tabel 1 dan Tabel 2) maka dapat dilakukan perbandingan mengenai pengaturan ritel modern dengan pasar tradisional di kedua kota tersebut. Demi terwujudnya asas keseimbangan kepentingan pelaku usaha ritel modern dengan pasar tradisional, peraturan daerah setidaknya harus memuat lima indikator, yaitu memperhatikan keresahan sosial dari pendirian suatu ritel modern, izin usaha, lokasi usaha berhubungan dengan keberadaan pasar tradisional, jam pelayanan suatu ritel modern, serta lokasi yang harus sejalan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) suatu daerah. Berikut ini adalah tabel perbandingan kedua peraturan daerah tersebut dalam mewadahi lima indikator tersebut.

Tabel 3
Perbandingan Pengaturan Ritel Modern Dengan Pasar Tradisional Di Kota Malang
Dan Kota Surakarta

Tolok Ukur	Perda Kota Malang Nomor 8 Tahun 2010	Perda Kota Surakarta Nomor 5 Tahun 2011
Keresahan Sosial	Tidak ada ukuran keresahan sosial yang diatur	Diatur pada saat perizinan pendirian pusat perbelanjaan dan toko modern terutama pada AMDAL atau UKL/UPL (Pasal 16)
Izin Usaha	Diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota Kota Malang Nomor 28 Tahun 2009	Terdapat di dalam Pasal 16

Lokasi Usaha	Pendirian toko modern hanya dapat dilakukan pada jarak 500 meter antar minimarket, toko dan pasar tradisional/usaha perdagangan mikro (Pasal 23)	<p>Lokasi pusat perbelanjaan dan toko modern mengacu pada Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Rencana Tata Ruang Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang Kota, pengaturan zonasinya, serta tetap memperhatikan kebutuhan, tingkat perkembangan sosial dan ekonomi masyarakat dalam rangka pengembangan UMKM, koperasi, dan pasar tradisional (Pasal 7).</p> <p>Jarak pusat perbelanjaan dan toko modern dengan pasar tradisional paling dekat adalah 500 (lima ratus) meter. Namun hal ini dikecualikan apabila pasar tradisional terintegrasi dengan pusat perbelanjaan dan toko modern selain minimarket (Pasal 7)</p>
Jam Pelayanan	Tidak diatur	Diatur di dalam Pasal 13
Tata Ruang	Mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Detail Tata Ruang Kota termasuk peraturan zonasinya (Pasal 23)	Mengacu pada Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Rencana Tata Ruang Wilayah Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang Kota, termasuk pengaturan zonasinya serta memperhatikan kebutuhan, tingkat perkembangan sosial dan ekonomi masyarakat sekitar dalam rangka

		pengembangan UMKM, Koperasi dan Pasar Tradisional (Pasal 7)
--	--	-------------------------------------------------------------

Selain indikator-indikator yang telah dijabarkan di atas, barang atau komoditas apa saja yang dapat dijual di ritel modern merupakan hal penting yang harus diatur di dalam suatu peraturan daerah, karena komoditas seperti hasil pertanian yang segar, yang selama ini dapat ditemukan di pasar tradisional, apabila dapat ditemukan juga di ritel modern, maka pasar tradisional dapat menjadi korban akibat kalah bersaing dari ritel modern. Mengenai jenis barang yang dijual ini, kedua peraturan daerah tersebut berbeda. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2010 tidak memuat pengaturan jenis barang, sedangkan di dalam Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 5 Tahun 2011, terutama Pasal 10 Ayat (1) mengatur mengenai jenis barang yang dijual di ritel modern, yang dapat disimpulkan bahwa pasar tradisional dapat dengan leluasa menjual berbagai jenis barang di tengah batasan jenis barang dagangan pada ritel modern.

D. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan uraian hasil dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka sebagai penutup dari penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Prinsip asas keseimbangan kepentingan antara ritel modern dengan pasar tradisional adalah kesempatan berusaha yang sama di antara keduanya sehingga keadilan tercapai. Dalam penerapannya, asas keseimbangan kepentingan dalam hukum persaingan usaha tetap memperhatikan kepentingan pelaku usaha kecil yang sejalan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
2. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2010 dan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 5 Tahun 2011 sama-sama mengatur tentang ritel modern dan pasar tradisional. Namun dari segi kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan di atasnya, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan Pasar Tradisional, Toko Modern, dan Pusat Perbelanjaan, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pedoman Penataan Pasar Tradisional, Toko Modern, dan Pusat Perbelanjaan, Peraturan Daerah Kota Surakarta lebih mengakomodasi asas keseimbangan kepentingan pelaku usaha ritel

modern dan pasar tradisional dibandingkan dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2010.

3. Model pengaturan yang tepat mengenai asas keseimbangan kepentingan antara pelaku usaha ritel modern dengan pasar tradisional dalam peraturan daerah memuat pengaturan mengenai keresahan sosial, izin usaha, lokasi usaha, jam pelayanan, dan tata ruang. Selain itu barang atau komoditas apa saja yang dapat dijual di ritel modern merupakan hal penting yang harus diatur di dalam suatu peraturan daerah agar pasar tradisional tidak menjadi korban dari persaingan yang tidak imbang antara keduanya.

Disarankan:

1. Penerapan prinsip asas keseimbangan kepentingan antara pelaku usaha ritel modern dengan pasar tradisional dalam hukum persaingan usaha sudah cukup baik, namun perlu diperjelas hubungan antara persaingan usaha dengan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah.
2. Pemerintah-pemerintah di daerah harus dapat mengakomodasinya dalam setiap kebijakan di daerah sehingga dapat tercapai keadilan dan perlindungan terhadap pasar tradisional, yang sebagian besar bahkan seluruhnya merupakan pedagang kecil.
3. Model pengaturan persaingan usaha antara ritel modern dengan pasar tradisional di daerah setidaknya harus memuat aturan mengenai keresahan sosial, izin usaha, lokasi usaha, jam pelayanan, dan tata ruang. Selain itu barang atau komoditas apa saja yang dapat dijual di ritel modern merupakan hal penting yang harus diatur di dalam suatu peraturan daerah agar pasar tradisional tidak menjadi korban dari persaingan yang tidak imbang antara keduanya.

E. Daftar Pustaka

Literatur Buku

- Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Anti Monopoli*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002
- Andi Fahmi Lubis, dkk, *Hukum Persaingan Usaha : Antara Teks dan Konteks*, KPPU, Jakarta, 2009
- Tulus T.H. Tambunan dan Dedie S. Martadisastra, *Policy Discussion Paper Series: Apa Dampak Dari UU Persaingan Usaha No. 5 Tahun 1999 Terhadap Kemiskinan*, Center For Industry, SME & Business Competition Studies, Universitas Trisakti, Jakarta, 2009

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53 Tahun 2008 Pedoman Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70 Tahun 2013 Pedoman Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern.

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perdagangan Dan Perindustrian.

Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern.

Putusan

Putusan Nomor: 03/KPPU-L-I/2000: PT. Indomarco Prismatama vs Lembaga Swadaya Masyarakat Perwakilan Pengusaha Kecil di Jakarta.

Tesis

Winarno SH, Dalam Tesis: *Perumusan Asas Keseimbangan Kepentingan Dalam UU no.5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta Penerapan Hukumnya Dalam Putusan Hakim Atas Perkara Persaingan Usaha*, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, 2009

Artikel Ilmiah

Richy Ardiansyah, *Analisis Yuridis Tentang Penerapan Asas Keseimbangan Kepentingan Dalam Penyelesaian Perkara Persaingan Usaha Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2013

Majalah

Adrie Poesoro, *Pasar Tradisional Di Era Persaingan Global*, SMERU Newsletter Nomor 22: April-Juni, 2007

Ali Jusmono, *Persaingan Usaha Pasar Ritel Di Indonesia: Siapa Yang Menang*, Jurnal Hukum Bisnis Vol. 27 No. 1 Tahun 2008, Fakultas Hukum Unika Atma Jaya, Jakarta, 2008

Dedie S. Martadisastra, *Persaingan Usaha Ritel Modern dan Dampaknya Terhadap Perdagangan Ritel Tradisional*, Jurnal Persaingan Usaha Vol. 4, Jakarta, KPPU, 2010

Euis Soliha, *Analisis Industri Ritel Di Indonesia*, Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE) Vol. 15 No. 2, September 2008

M. Djumantri, *Pasar Tradisional, Ruang Masyarakat Tradisional Yang Terpinggirkan* Majalah Kompetisi Edisi 34, *Negeri Surga Ritel*, 2012

Tri Joko Utomo, *Persaingan Bisnis Ritel: Tradisional vs Modern*, Fokus Ekonomi Vol.6 No.1 Juni 2011

Uswatun Hasanah dan Indien Winarwati, Dalam Jurnal: *Studi Kompetensi Antara Pasar Tradisional Dengan Toko Modern Pasca Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Di Madura*, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 12 Nomor 2 Mei 2012

Internet

Apipudin, *Brand Switching Analysis Dalam Industri Ritel Modern*, Frontier Consulting Group, diakses dari <http://www.frontier.co.id/tag/brand-switching-analysis>

Indonesia Finance Today 24 Juli 2012, *Pendapatan Hero Capai Rp 4,83 Triliun di Semester I*, diakses di <http://www.indonesiainancetoday.com/read/30509/Pendapatan-Hero-Capai-Rp-483-Triliun-di-Semester-I>

Indonesia Finance Today 23 September 2013, *Indomaret Bukukan Laba Kotor Rp 2,93 Triliun*, diakses di <http://www.indonesiainancetoday.com/read/30509/Pendapatan-Hero-Capai-Rp-483-Triliun-di-Semester-I>

Kompas.com 20 November 2012, *CT Borong Seluruh Saham Carrefour Indonesia*, diakses di <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2012/11/20/16250733/CT.Borong.Seluruh.Saham.Carrefour.Indonesia>

Tingkatkan Akses Pemasaran Produk Indonesia, Mendag Terbitkan Permendag Baru, diakses di www.kemendag.go.id